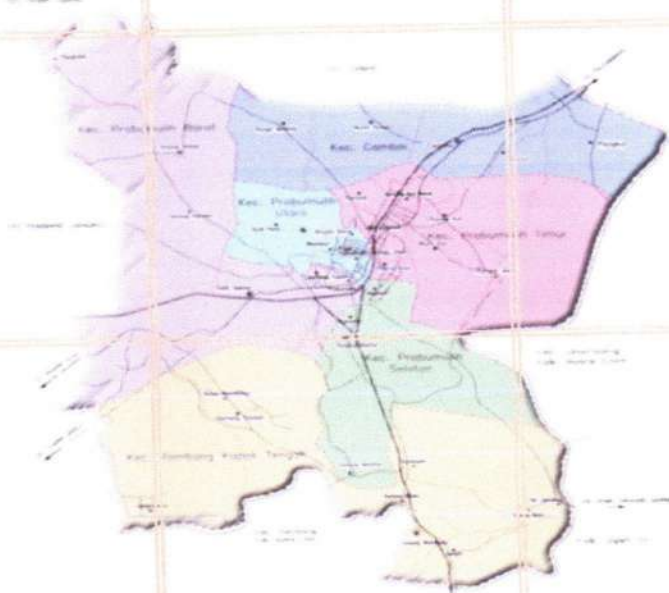




PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH



RENCANA KERJA DINAS PUPR TAHUN 2025



KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Prabumulih Tahun 2025 dapat diselesaikan.

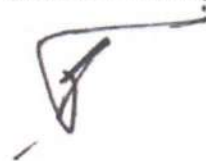
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Prabumulih Tahun 2025 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2025. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Tahun 2025 ini dilaksanakan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Prabumulih, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Prabumulih tahun 2020 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kota Prabumulih Tahun 2024 - 2026.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan penyusunan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Dokumen RENJA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Prabumulih tahun 2025.

Prabumulih, 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Prabumulih



H. BENI AKBARI, ST., MM
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197901082003121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	35
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025.....	42
BAB V PENUTUP.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan RENJA Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun 2025 ini memuat program dan kegiatan untuk Tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Prabumulih mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun 2025 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025, yang selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rancangan APBD yaitu

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025.

Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja OPD

Anggota Tim Penyusunan Renja OPD merupakan pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD.

b. Orientasi mengenai Renja OPD

Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

c. Penyusunan Agenda Kerja

Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD sampai dengan penetapan dan pengarsipan dokumen Renja. Agenda kerja ini dapat dibuat dalam bentuk bagan alir.

d. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
- 2) Mengumpulkan data atau informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

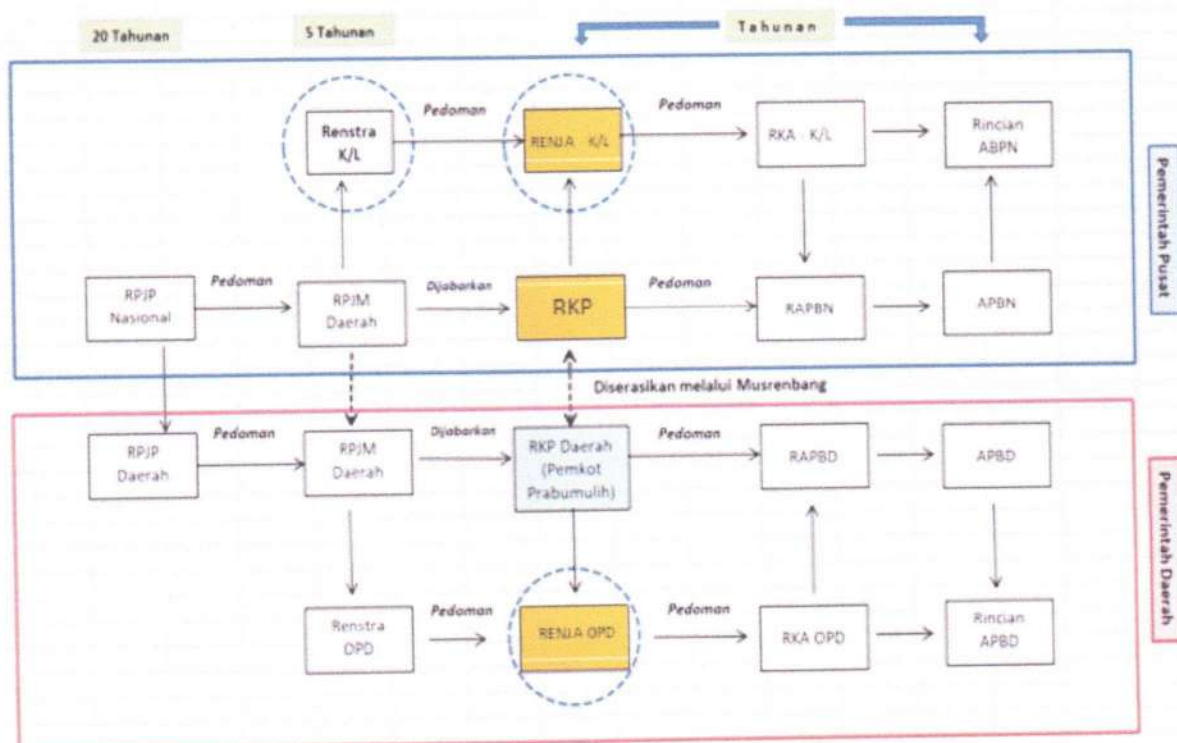
Berikut adalah bagan alir agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun 2025.

Bagan Alir Agenda Kerja Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Prabumulih

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
		Staff	Kasubbag Program dan Pelaporan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengumpulkan Bahan penyusunan Renja SKPD						Dokumen Arsip	10 hari	bahan penyusunan Renja	
2	Menganalisis data dan informasi Renja yang telah terkumpul						Komputer / Laptop	5 hari	data /bahan penyusunan renja	
3	Membuat konsep rencana kerja [Renja] SKPD						Renstra, Pagu Indikatif, RKPD, IKU, IKK	10 hari	Draft Renja	
4	Mengoreksi konsep dokumen rencana kerja [Renja]						Renstra, Pagu Indikatif, RKPD, IKU, IKK, Komputer	2 hari	Draft Renja	
5	Menyampaikan dokumen rencana kerja kepada Kepala Dinas untuk meminta persetujuan						Draft Renja	2 hari	Draft Renja	
6	Penandatangan dokumen rencana kerja oleh Kepala Dinas						Draft Renja	2 hari	Draft Renja	
7	Pengandaan dan Pengiriman Renja SKPD						Biaya pengandaan, ATK	1 hari	Dokumen Renja	
8	Pengarsipan						lemari arsip	1 hari	Arsip Renja	

Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Berikut adalah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berupa alur keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Renstra DPUPR akan menjadi dasar kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk 5 tahun ke depan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
16. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Tujuan penyusunan RENJA adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
2. Sebagai media untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*);
4. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja seperti: **latar belakang** (yang berisi pengertian, proses penyusunan dan keterkaitan dengan

dokumen perencanaan lainnya); **landasan hukum** (berisikan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan perencanaan); **maksud dan tujuan**(berisi maksud dan tujuan dari penyusunan Renja) dan **sistematika penulisan** yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD.

BAB II :HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

Pada bagian ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Rensta, Analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD, dan penelaahan usulan program kegiatan masyarakat.

BAB III :TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB V :PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun 2024 - 2026. Evaluasi Renja Tahun 2025 dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Prabumulih dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Prabumulih.

Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Prabumulih berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) T.A 2023 ditetapkan sebesar **Rp 55.363.876.950,- (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)** yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp 31.788.798.331,- (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)** dan belanja modal sebesar **Rp23.575.078.619,- (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah)**. Dalam pelaksanaannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) T.A 2023 mengalami perubahan anggaran pada OPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPA Perubahan -OPD) sehingga menjadi **Rp158.643.182.950,- (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)** yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp 51.556.329.071,- (Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Satu**

Rupiah) dan belanja modal sebesar **Rp107.086.853.479,- (Seratus Tujuh Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)**. Total nilai realisasi belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun 2023 sebesar Rp. **149.959.009.597,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)** atau **95,10 %** dari total alokasi dana sebesar Rp. **Rp158.643.182.950,- (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)**.

Hasil kinerja program/kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023 telah memenuhi target, meskipun terdapat satu program/kegiatan yang pencapaiannya belum sesuai target. Dari 12 (Dua Belas) program dan 19 (Delapan Puluh Empat) kegiatan serta 50 (Lima Puluh) Sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 hanya 47 (Empat Puluh Tujuh) Sub kegiatan yang pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target karena alasan tersebut diatas. Kondisi ini akan mengurangi capaian target Renstra. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka akan dilakukan upaya untuk penambahan target kinerja pada tahun yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

1. Lebih teliti dan mencari informasi yang lebih detail dalam hal pelaksanaan perencanaan suatu kegiatan kegiatan;
2. Melakukan penyesuaian dalam penganggaran tahun berikutnya dengan acuan serapan tahun sebelumnya.

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2023

NO	JUMLAH PROGRAM / KEGIATAN	PENYEDIAAN DANA (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.507.350.745,-	11.784.989.403,-	81,23	98,21
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255.000.000,-	249.941.211,-	98,02	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000,-	68.469.806,-	97,81	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000,-	49.837.205,-	99,67	100
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-P SKPD	50.000.000,-	49.203.200,-	98,41	100
1.4	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,-	48.383.000,-	96,77	100
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,-	34.048.000,-	97,28	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.028.513.848,-	5.846.431.757,-	83,18	100
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.890.313.848,-	6.708.334.757,-	82,85	100
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	118.200.000,-	118.200.000,-	100	100
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,-	19.897.000,-	99,48	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.200.000,-	40.200.000,-	100	100
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.200.000,-	40.200.000,-	100	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	330.000.000,-	129.657.000,-	39,29	75
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	130.000.000,-	129.657.000,-	99,74	100
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,-	0	0	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.272.891.897,-	4.383.904.412,-	83,14	100
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,-	9.985.500,-	99,86	100
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.000.000,-	160.222.000,-	99,52	100
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.000,-	69.637.000,-	99,48	100

5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	790.000.000,-	765.622.361,-	96,91	100
5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	500.000.000,-	307.511.650,-	61,50	100
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	120.000.000,-	77.635.000,-	64,70	100
5.7	Penyediaan Bahan/Material	782.500.000,-	782.500.000,-	100	100
5.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	200.000.000,-	180.689.714,-	90,34	100
5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.309.076.897,-	1.703.192.134,-	73,76	100
5.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	330.315.000,-	326.909.053,-	98,97	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	611.285.000,-	231.461.183	37,86	100
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	659.460.000,-	646.600.000,-	98,05	100
6.2	Pengadaan Mebel	100.000.000,-	99.790.000,-	99,79	100
6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000,-	89.800.000,-	99,78	100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.000.000,-	67.201.840	56	100
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000,-	26.000.000,-	56	100
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,-	41.201.840,-	82,40	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.285.000	231.461.183	37,86	100
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	501.285.000,-	197.896.183,-	39,48	100
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000,-	35.565.000,-	30,51	100
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,-	289.344.500,-	96,45	100
1.1	Pembangunan Tanggul Sungai	300.000.000,-	289.344.500,-	96,45	100
III	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	600.000.000,-	513.968.250,-	85,66	100

1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,-	513.968.250,-	85,66	100
1.1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	600.000.000,-	513.968.250,-	85,66	100
IV	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.247.500.000,-	2.232.879.500,-	99,35	100
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.247.500.000,-	2.232.879.500,-	99,35	100
1.1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.019.750.000,-	1.013.865.750,-	99,42	100
1.2	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.227.750.000,-	1,073,670,305,-	71,578	100
V	Program Pengembangan Permukiman	19.984.497.300,-	19.916.128.300,-	99,66	100
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	19.984.497.300,-	19.916.128.300	99,66	100
1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	19.984.497.300,-	19.916.128.300	99,66	100
VI	Program Penataan Bangunan Gedung	17.728.126.205,-	16.711.945.000,-	94,27	83,33
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	17.728.126.205,-	16.711.945.000,-	94,27	83,33
1.1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9.878.825.205,-	9,870,516.500,-	99,92	100
1.2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7,349.300.000,-	6.798.348.000,-	92,50	100
1.3	Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Serifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	500.000.000,-	43.080.500,-	8,62	50
VII	Program Penyelenggaraan Jalan	100.406.402.700	97.769.066.807	97,37	92,86
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100.406.402.700	97.769.066.807	97,37	92,86

1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000,-	32.250.000,-	16,12	50
1.2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	400,000,000,-	398871.250,-	99,72	100
1.3	Pembangunan Jalan	59.701.900.000,-	58.781.210.750,-	98,46	100
1.4	Rekonstruksi Jalan	30.800.398.393,-	29.498.972.750,-	95,77	100
1.5	Rehabilitasi Jalan	8.193.104.307,-	8.152.062.807,-	99,50	100
1.6	Pembangunan Jembatan	427.750.000,-	405.148.750,-	94,72	100
1.7	Rehabilitasi Jembatan	683,250.000,-	500.550.500,-	73,26	100
VIII	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	150.000.000,-	104.516.000,-	69,68	100
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,-	104.516.000,-	69,68	100
1.1	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	150.000.000,-	104.516.000,-	69,68	100
IX	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.000.000.000,-	126.508.837,-	12,65	66,67
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.000.000.000,-	126.508.837	12,65	66,67
1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	400,000,000,-	0	0	0
1.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	400,000,000,-	0	0	0
1.3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	200,000,000,-	126.508.837,-	63,25	100
X	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50.000.000	48.578.250	97.16	100
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	48.578.250	97.16	100
1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	48.578.250	97.16	100

XI	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1.500.000.000	297.768.000	19,85	100
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	297.768.000	19,85	100
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	297.768.000	19,85	100
XI	Program Penatagunaan Tanah				
1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	87.017.000	87,02	100
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	100.000.000	87.017.000	87,02	100
		158.673.876.950,-	149.959.009.597,-	94,51	95,10

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan dimaksud yang ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih. Pengukuran dimaksud itu merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran.

Hasil pengukuran kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun 2023 dan Realisasi Renstra

NO	Jumlah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024 – 2026				
				Target Akhir Renstra 2023	Tahun 2023			Tahun 2024
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9
1	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				14.507.350.745,-	11.784.989.403,-	81,23	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				255.000.000,-	249.941.211,-	98,02	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20 Dokumen	70.000.000,-	68.469.806,-	97,81	2 Dokumen
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,-	49.837.205,-	99,67	1 Dokumen

c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-P SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5 Dokumen	50,000,000,-	49.203.200,-	98,41	1 Dokumen
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5 Laporan	50,000,000,-	48.383.000,-	96,77	1 Laporan
e.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5 Laporan	35,000,000,-	34.048.000,-	97,28	1 Laporan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.028.513.848,-	5.846.431.757,-	83,18	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	300 Orang	6.890.313.848,-	6.708.334.757,-	82,85	60 Orang
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60 Dokumen	118.200.000,-	118.200.000,-	100	12 Dokumen
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	20,000,000,-	19.897.000,-	99,48	1 Laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40.200.000,-	40.200.000,-	100	1 Laporan

a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5 Laporan	40.200.000,-	40.200.000,-	100	1 Laporan
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				330.000.000,-	129.657.000,-	39,29	100 Paket
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	500 Paket	130,000,000,-	129.657.000,-	39,29	100 Paket
b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang melakukan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25 orang	200,000,000,-	0	0	5 Orang
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.272.891.897,-	4.383.904.412,-	83,14	30 Paket
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	150 Paket	10,000,000,-	9.985.500,-	99,86	10 Paket
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50 Paket	161.000.000,-	160.222.000,-	99,52	10 Paket
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50 Paket	70,000,000,-	69.637.000,-	99,48	10 Paket
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100 Paket	790.000.000,-	765.622.361,-	96,91	20 Paket
e.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25 Paket	500,000,000,-	307.511.650,-	61,50	5 Dokumen

f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60 Dokumen	120.000.000,-	77.635.000,-	64,70	12 Dokumen
g.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	125 Paket	782.500.000,-	782.500.000,-	100	25 Paket
h.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60 Laporan	200.000.000,-	180.689.714,-	90,34	12 Laporan
i.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60 Laporan	2.309.076.897,-	1.703.192.134,-	73,76	12 Laporan
j.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	40 Dokumen	330.315.000,-	326.909.053,-	98,97	3 Unit
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				611.285.000,-	231.461.183	37,86	
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2 unit	659.460.000,-	646.600.000,-	98,05	2 unit
b.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	60 paket	100.000.000,-	99.790.000,-	99,79	12 paket
c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5 Laporan	90.000.000,-	89.800.000,-	99,78	1 Laporan

III.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				600.000.000,-	513.968.250,-	85,66	1503,74 M
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,-	513.968.250,-	85,66	
a.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	1.000 SR	600.000.000,-	513.968.250,-	85,66	200 SR
IV.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				2.247.500.000,-	2.232.879.500,-	99,35	
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.247.500.000,-	2.232.879.500,-	99,35	
a.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang terbangun	Meter	50 KM	1.019.750.000,-	1.013.865.750,-	99,42	6,65 KM
b.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dilakukan Rehabilitasi	Meter	10 KM	1.227.750.000,-	1.073.670.305,-	71,578	2,1 KM

V.	Program Pengembangan Permukiman				19.984.497.300,-	19.916.128.300,-	99,66	
1.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				19.984.497.300,-	19.916.128.300	99,66	
a.	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	135 Unit	19.984.497.300,-	19.916.128.300	99,66	95 unit
VI.	Program Penataan Bangunan Gedung				17.728.126.205,-	16.711.945.000,-	94,27	
1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				17.728.126.205,-	16.711.945.000,-	94,27	
a.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	80 Dokumen	9.878.825.205,-	9.870.516.500,-	99,92	21 dokumen
b.	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit	70 Unit	7.349.300.000,-	6.798.348.000,-	92,50	21 unit

c.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	200 Dokumen	500.000.000,-	43.080.500,-	8,62	50 Dokumen
VII.	Program Penyelenggaraan Jalan				100.406.402.700	97.769.066.807	97,37	
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				100.406.402.700	97.769.066.807	97,37	
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,-	32.250.000,-	16,12	1 Dokumen
b.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	5 Dokumen	400.000.000,-	398871.250,-	99,72	1 Dokumen
c.	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Terbangun	Km	154,928 km	59.701.900.000,-	58.781.210.750,-	98,46	13, 98 KM

d.	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km	154,928 km	30.800.398.393,-	29.498.972.750,-	95,77	53,09 KM
e.	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	154,928 km	8.193.104.307,-	8.152.062.807,-	99,50	4,23 KM
f.	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	m	63,75 meter	427.750.000,-	405.148.750,-	94,72	6 m
g.	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	2,392 meter	683,250.000,-	500.550.500,-	73,26	14,1 m
VIII	Program Pengembangan Jasa Konstruksi				150.000.000,-	104.516.000,-	69,68	
1.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,-	104.516.000,-	69,68	
a.	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,-	104.516.000,-	69,68	1 Dokumen
IX	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				1.000.000.000,-	126.508.837,-	12,65	
1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				1.000.000.000,-	126.508.837	12,65	
a.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	400,000,000,-	0	0	1 Dokumen
b.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan	Dokumen	1 Dokumen	400,000,000,-	0	0	1 Dokumen

	Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota							
c.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					200,000,000,-	126.508.837,-	63,25	
X	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					50.000.000	48.578.250	97.16	
1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000	48.578.250	97.16	
a.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5 Dokumen		50.000.000	48.578.250	97.16	1 Dokumen
XI	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		Dokumen	5 Dokumen		1.500.000.000	297.768.000	19,85	1 Dokumen
a.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5 Dokumen		1.500.000.000	297.768.000	19,85	1 Dokumen
XI	Program Penatagunaan Tanah								

1	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	87.017.000	87,02	1 Dokumen
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	87.017.000	87,02	1 Dokumen
					158.673.876.950,-	149.959.009.597,-	94,51	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih merupakan OPD yang mengemban amanah masyarakat Kota Prabumulih dalam hal Pembangunan Infrastruktur semua bidang mempunyai indikator kinerja untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan/ditargetkan.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Prabumulih dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan yang selanjutnya dilakukan evaluasi agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun 2025, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2023, dimana telah dilakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Dari hasil evaluasi tersebut Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Prabumulih memperoleh nilai dengan kategori BB masuk dalam interpretasi Sangat Baik, yang berarti sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Sedangkan untuk nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2022 yang mempunyai target dengan nilai BB masih belum diketahui apakah telah sesuai target atau belum. Hal ini dikarenakan OPD yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih sampai dengan laporan ini dibuat belum menerima hasilnya

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Prabumulih

No	Indikator IKK	Angka/ Nilai Target/ Standar (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	Persen (%)						100%	100%			Data diperoleh dari DPMPTSP Dinas PUPR
2.	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen (%)	85%	86%	86,5%	87%	88%	81,8%	83,54 %			Dinas PUH
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	Persen (%)						76,85 %				Data diperoleh dari Disper dan Dinke
4.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	Persen (%)						86,95 %				Data diperoleh dari BPBD dan Kel/Desa
5.	Rasio tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen (%)						100%	100%			Data diperoleh dari UKPB

6.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan kerja	Persen (%)							100%	100%			Data diperoleh dari Dinas P.
7.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungan terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen (%)	0,01%	0	0,02%	0,028%	0,026%	94,9%					Data diperoleh dari PDAM Dinas Kesehatan Dinas Perk dan Dinas P.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Identifikasi permasalahan dan isu – isu strategis merupakan tahapan yang penting pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan-kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lima tahun mendatang.
2. Selain itu perumusan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang periode 2018-2023 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan KLHS serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Untuk mengetahui situasi dan kondisi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi yang menangani suatu urusan dilakukan dengan cara mengidentifikasi organisasi tersebut melalui suatu analisa, dan analisa yang digunakan mengidentifikasi tentang kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) atau yang disebut dengan Analisa SWOT.

2.3.1 Analisa Faktor Lingkungan Internal

Faktor-faktor internal yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih terdiri dari :

1. Kekuatan, yaitu :
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih
 - Struktur Organisasi yang jelas

- Tersedianya sumber daya manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - Kemampuan Perencana infrastruktur yang handal.
2. Kelemahan, yaitu :
- Prasarana dan sarana yang belum memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - Belum semua kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh teamwork yang terpadu.
 - Belum optimalnya sumberdaya manusia yang ada.
 - Dana penanganan dan pembangunan infrastruktur yang terbatas.

2.3.2 **Analisis Faktor Lingkungan Eksternal**

Faktor-faktor eksternal yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja terdiri dari :

Peluang

1. *Terjadinya kerjasama antara dalam negeri dan luar negeri, terutama dalam pengembangan sumberdaya aparatur*

Banyaknya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri melalui pendidikan formal maupun informal melalui beasiswa penuh maupun kemudahan izin belajar menjadi peluang yang harus benar-benar dimanfaatkan untuk menambah wawasan pegawai.

2. *Adanya Bantuan Program/Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana APBD Propinsi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan Investor Baik Dalam maupun Luar negeri*

Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas sangat membutuhkan dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat, propinsi maupun investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

3. *Adanya Kerjasama Antar Instansi dan Antar Daerah*

Perkembangan Kota Prabumulih ke depan mengingat letak geografisnya yang sangat strategis, tentunya tidak terlepas dari hubungan kerjasama dengan daerah sekitar yang saling menguntungkan. Hal ini akan menjadi peluang yang sangat besar untuk dikembangkan demi kemajuan Kota Prabumulih

4. *Pemanfaatan Teknologi Informasi*

Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat, menjadi peluang tersendiri untuk dapat mengoptimalkan teknologi tersebut dalam rangka mengatasi segala permasalahan daerah

Ancaman

1. *Tingginya Tuntutan Peningkatan Pelayanan*

Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan publik di Kota Prabumulih menjadi peluang Pemerintah Daerah untuk berupaya memenuhi tuntutan tersebut dengan melakukan beberapa peningkatan dan pengembangan pelayanan yang dilakukan pemerintah hingga ke tingkat kelurahan/desa.

2. *Sering Berubahnya Peraturan Perundangan*

Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dan terkadang kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lain menyebabkan Pemerintah Daerah terkadang bingung dalam menyikapi kebijakan apa yang sebaiknya diambil

3. *Kebutuhan Data Yang Valid Dalam Setiap Proses Perencanaan*

Data yang valid dan update menjadi urat nadi dalam membuat perencanaan yang baik, akurat, sinergi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matrik SWOT.

Matrik SWOT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Prabumulih		
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL		
Analisis Lingkungan Internal ALI ALE Analisis Lingkungan Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih dalam Wilayah Kota Prabumulih. 2. Struktur Organisasi yang jelas. 3. Tersedianya sumberdaya manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 4. Kemampuan perencanaan infrastruktur yang handal.	1. Prasarana dan sarana yang Belum memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Belum semua kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh teamwork yang terpadu. 3. Belum optimalnya sumberdaya manusia yang ada. 4. Dana penanganan dan pembangunan infrastruktur yang terbatas.
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL		
Peluang (O)	(S) + (O)	(W) + (S)
1. Adanya bantuan program /kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan Investor baik dalam maupun luar negeri	1. Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pelaksana pembangunan sehingga terciptanya sistem kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel serta proaktif.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan

2. Adanya kerjasama antar instansi. 3. Terjalannya kerjasama dalam negeri dan luar negeri, terutama dalam pengembangan sumberdaya aparatur melalui pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca sarjana) dan Diklat/Kursus untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tupoksi. 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi	2. Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dengan menyusun produk-produk Renstra, RKT yang akan diupayakan pula agar dapat menjadi acuan atau arahan Umum guna penyelarasan Dan penyerasian perencanaan pembangunan dengan pembangunan kota secara menyeluruh dengan mengacu pada dokumen seperti diatas. 3. Membangun kemampuan aparatur dalam mengantisipasi era teknologi yang dapat menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2. Meningkatkan Teamwork yang terpadu dan handal guna menunjang kegiatan-kegiatan APBD dan APBN. 3. Meningkatkan kesediaan SDA untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih
Tantangan/Ancaman (T)	(S) + (T)	(W) + (T)
1. Pengajuan usulan kegiatan pembanguna dari dinas/instansi belum sepenuhnya mengacu pada RPJPD Kota Prabumulih dan RPJMD Kota Prabumulih 2. Adanya perubahan sistem anggaran yang berlaku dengan mengakibatkan terlambatnya penyusunan DPA sehingga terhambatnya pelaksanaan kegiatan. 3. Terlambatnya Pengesahan Dokumentasi Anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat.	1. Menyusun kegiatan yang sesuai dengan RPJMD Kota Prabumulih. 2. Menyusun RKA dengan berbasis anggaran kinerja. 3. Menyusun DPA dengan melibatkan tenaga yang profesional.	1. Meningkatkan prasarana dan sarana dengan mengacu pada RPJMD Kota Prabumulih. 2. Meningkatkan kemampuan Team work menyusun RKA berbasis anggaran kinerja. 3. Mengoptimalkan kinerja SDA dalam menyusun RKA.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan target Renstra dan tingkat kinerja SKPD. Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap rancangan RKPD maka didapatkan banyak perbedaan terhadap target capaian,

pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan dan adanya beberapa kegiatan bertambah dimana dirancangan awal RKPD tidak direncanakan namun pada hasil analisis kebutuhan kegiatan tersebut dijalankan serta adanya program kegiatan yang ketika dirancangan awal RKPD ada namun ketika analisis kebutuhan tidak dapat dijalankan. Perbedaan-perbedaan diatas dikarenakan keterbatasan alokasi dana dan kebutuhan yang mendesak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Tahun 2020 dan disesuaikan dengan kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LS, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah di Kota Prabumulih yang langsung ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan Penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kota Prabumulih.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan.

Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya bidang PU dan permukiman di Indonesia adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis, disparitas dan distribusi penduduk di Jawa dan luar Jawa, menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti jalan provinsi/kabupaten/kota, serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

3.1.1 Sub Bidang Cipta Karya

a. Tantangan pembangunan

- Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota dan provinsi.
- Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
- Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.

- Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
- Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.
- Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.
- Menyelaraskan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional.

3.1.2 Sub Bidang Bina Marga

a. Tantangan pembangunan

- Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang berbasis pada tata ruang dan sistem transportasi nasional harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil, pusat kegiatan ekonomi kreatif, *domestic connectivity*, dan sistem logistik nasional dalam rangka pencapaian MDGs.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan

jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta *outlet*.

- Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan perkuatan terutama dalam menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitasi jalan daerah, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

b. Isu strategis

- Sebagian ruas-ruas baru yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.
- Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
- Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
- Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRWN, yang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri dan kolektor primer.

3.1.3 Sub Bidang Tata Ruang

a. Tantangan pembangunan

- Melakukan percepatan penyelesaian Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau / Kepulauan, Kawasan Strategis Nasional, serta Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Melakukan pembinaan penataan ruang, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kemampuan

aparatus perencana maupun pelaksana pengendalian pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.

- Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan.
- Meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan dan pemberian insentif serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang baik di tingkat pusat dan daerah dalam rangka menjamin kesesuaian antara rencana tata ruang dan implementasinya.

b. Isu strategis

- Tingginya alih fungsi lahan, terutama dari kawasan hutan dan pertanian menjadi daerah terbangun, baik berupa kawasan industri maupun permukiman.
- Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana banjir, dan kekeringan, yang diperburuk dengan adanya dampak perubahan iklim dan siklus hidrologi yang ekstrem.
- Perlunya mendorong terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan akibat pertumbuhan penduduk dan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Makin meningkatnya urbanisasi dan jumlah penduduk perkotaan yang belum diimbangi dengan kualitas penyediaan infrastruktur permukiman dan infrastruktur perkotaan yang memadai, yang ditandai dengan masih banyaknya kawasan kumuh perkotaan, kemacetan lalu lintas dan tingginya PKL dan sektor informal.
- Meningkatnya jumlah Daerah Aliran Sungai yang kritis yang ditandai dengan berkurangnya luas kawasan hutan dan menurunnya proporsi ruang terbuka hijau di perkotaan.

Hasil review terhadap renstra Departemen Pekerjaan umum bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pusat dan daerah.

3.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2014 – 2034 bahwa Ruang lingkup RTRW Kota Prabumulih mencakup :

- a. Wilayah perencanaan yang meliputi seluruh wilayah administrasi; dan
- b. Batas-batas wilayah

Dimana Wilayah perencanaan sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi seluruh wilayah kota Prabumulih seluas 434,46 Km² yang meliputi 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kecamatan Prabumulih Timur, Kecamatan Prabumulih Barat, Kecamatan Cambai, Kecamatan Prabumulih Utara dan Kecamatan Prabumulih Selatan.

Dengan Batas Wilayah Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

Penataan ruang wilayah kota bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kota Prabumulih sebagai kota perdagangan dan jasa berskala regional di simpul

transportasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berwawasan lingkungan. Strategi Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan meliputi :

- a. Mengembangkan jalan lingkar untuk memisahkan pergerakan antarkota dan pergerakan dalam kota;
- b. Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung dan tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kota dan subpusat pelayanan kota;
- c. Mengembangkan terminal angkutan umum regional dan terminal angkutan umum dalam kota;
- d. Mengembangkan terminal angkutan barang; dan
- e. Meningkatkan integrasi sistem antarmoda.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Prabumulih tahun 2014 – 2034 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam prakteknya, pembangunan Kota Prabumulih sering kali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota sering kali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektifitas RTRW sebagai instrument pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota yaitu dengan memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberi insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi yang tegas.

Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Karakter perkembangan kawasan terbangun Kota Prabumulih tidak terlepas dari keberadaan Kota Prabumulih yang berada pada jaringan jalan regional (Lintas Sumatera). Sebagai

konsekuensinya kawasan terbangun mengikuti pola jaringan jalan utama (linier) sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata.

Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Predikat Nilai Sakip	Dinas PUPR	LHE Inspektorat dan BPK	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP dari Inspektorat dan BPK
		Persentase Hasil Temuan yang ditindaklanjuti			
2.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Serta Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Air Bersih	Persentase Sambungan Rumah (SR) yang Terpasang	Dinas PUPR	Data Air Minum (SR)	Jumlah Penduduk yang terlayani melalui SR dibagi Total Jumlah Penduduk dikalikan 100%
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik		Data Base Drainase Kota Prabumulih	Jumlah Panjang Drainase kondisi baik dibagi Total Jumlah Panjang Total Drainase dikalikan 100%
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Bangunan Gedung yang memenuhi standar Teknis	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Dinas PUPR	Data Inventaris Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung kondisi baik dibagi Jumlah Total Bangunan Gedung dikalikan 100%
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan guna Kelancaran Transportasi Barang dan Jasa	Persentase Panjang Jaringan Jalan/Jembatan dalam Kondisi Mantap	Dinas PUPR	Database Jalan dan Jembatan	Jumlah Panjang Jalan kondisi baik dibagi Panjang Seluruh Jaringan Jalan dikalikan 100%
5.	Meningkatnya Pembangunan yang selaras dengan Penyelenggaraan Penataan ruang Wilayah	Persentase Kesesuaian Peruntukkan Lahan dengan Tata Ruang	Dinas PUPR	Dokumen Rencana Tata RW Dan RDTR	Jumlah Lahan yang sudah memiliki KKPR dibagi Luas Wilayah Kota Prabumulih dikali 100
6.	Meningkatnya Penatausahaan Pertanahan, Fasilitas, Pemanfaatan Pertanahan dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah	Persentase Administrasi Pertanahan yang tertib	Dinas PUPR	Peta Bidang dari BPN	Persentase jumlah permasalahan pertanahan yang terfasilitasi dibagi jumlah permasalahan pertanahan yang diterima dikalikan 100%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PRABUMULIH
Tahun 2025

Alokasi anggaran untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun 2025

(Tabel dapat dilihat dilampiran)

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPUPR	3 dok	70.000.000,-
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	DPUPR	1 dok	50.000.000,-
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	D PUPR	1 dok	50.000.000,-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPUPR	1 Laporan	50.000.000,-

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPUPR	5 paket	10.000.000,-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPUPR	20 paket	150.000.000,-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPUPR	6 Paket	50.000.000,-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPUPR	16 paket	690.000.000,-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DPUPR	6 paket	500.000.000,-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPUPR	1 Dok	100.000.000,-
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DPUPR	53 paket	678.000.000,-

		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	DPUPR	1 laporan	200.000.000,-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPUPR	1 Laporan	2.075.000.000,-
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPUPR	8 Dokumen	360.000.000,-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	DPUPR	15 Unit	90.000.000,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPUPR	4 Laporan	70.000.000,-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPUPR	4 Laporan	50.000.000,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPUPR	15 unit	500.000.000,-

		Operasional atau Lapangan					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	DPUPR	6 unit	110.000.000,-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPUPR	10 unit	5.000.000.000,-	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	DPUPR	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,-	
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	DPUPR	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,-	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang terlayani melalui pemanfaatan idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik tertentu	DPUPR	38 SR	1.000.000.000,-	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DPUPR	10 Unit	1.000.000.000,-	

5.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	DPUPR	38 SR	300.000.000,-
6.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR	10 Dokumen	5.000.000.000,-
7.		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	DPUPR	100 Dokumen	500.000.000,-
			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	DPUPR	7,3 KM	12.500.000.000,-

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	DPUPR	5,52 KM	7.152.000.000,-
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	DPUPR	2 Jembatan	2.000.000.000,-
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	DPUPR	2 Jembatan	2.000.000.000,-
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	DPUPR	392,125 KM	400.000.000,-
8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	5,64 KM	10.000.000.000,-
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	DPUPR	2 Dokumen	200.000.000,-
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	DPUPR	1 Dokumen	300.000.000,-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data SHP Peta Dasar	DPUPR	1 Peta	200.000.000,-
		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	DPUPR	2 Dokumen	500.000.000,-

10	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	DPUPR	1 Laporan	1.000.000.000,-
11	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	DPUPR	1 Dokumen	200.000.000,-
Total							63.133.264.620,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 - 2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan.

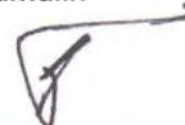
Rencana Kerja mengandung sasaran, indikator dan output program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kota Prabumulih.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi walikota terpilih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kota
Prabumulih



H. BENI AKBARI, ST., MM
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 197901082003121006

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rencana Tahun 2025													Praktiran Meju Rencana Tahun 2026						
Kode	Urusen / Bidang / Urusen / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja													
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan											
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										62.933.264.620,00				68.236.800.000,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										62.933.264.620,00				68.236.800.000,00			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										62.933.264.620,00				68.236.800.000,00		
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										18.881.264.620,00				19.746.800.000,00	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										255.000.000,00				282.000.000,00
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
					-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	77.000.000,00				
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
					-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	55.000.000,00				
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

					-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	-	1 Dokumen	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	55.000.000,00
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
					-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	-	5 Laporan	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	55.000.000,00
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
					-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	-	1 Laporan	-	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40.000.000,00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.723.064.620,00					8.158.000.000,00
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

					-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	55 Orang/bulan	-	7.580.364.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	8.000.000.000,00		
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
					-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	12 Dokumen	-	112.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	125.000.000,00		
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
					-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	1 Laporan	-	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	33.000.000,00		
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												45.000.000,00
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
					-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	12 Laporan	-	40.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	45.000.000,00		
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												253.000.000,00
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya												

					-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Paket	-	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	143.000.000,00
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
					-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Orang	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	110.000.000,00
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								4.813.000.000,00			4.606.800.000,00
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Paket	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	11.000.000,00
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Paket	-	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	165.000.000,00
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
					-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Paket	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	55.000.000,00
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

					-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	-	20 Paket	-	690.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	150.000.000,00	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	-	10 Paket	-	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	550.000.000,00	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
					-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	-	12 Dokumen	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	110.000.000,00	
1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												
					-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	-	25 Paket	-	678.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket	745.800.000,00	
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
					-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	-	12 Laporan	-	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	220.000.000,00	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

				-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	2.075.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.200.000.000,00
1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
					-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	8 Dokumen	-	360.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	400.000.000,00
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					90.000.000,00				99.000.000,00
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
					-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	99.000.000,00
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120.000.000,00				132.000.000,00
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
					-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	77.000.000,00
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
					-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.000.000,00

					Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam kondisi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /kota	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	75 %	2 Sistem Drainase Perkotaan	6,02 KM	1.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.100.000.000,00
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan											
					Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam kondisi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /kota	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	75 %	2 Sistem Drainase Perkotaan	6,02 KM	1.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.100.000.000,00
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN											
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/kota											
1	03	07	2.01	0020	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/kota											

						Jumlah materi teknis dan raperkada RDTR Kabupaten/Kot ^a	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah materi teknis dan raperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	550.000.000,00
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.200.000.000,00				1.320.000.000,00
2	10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						1.200.000.000,00				1.320.000.000,00
2	10	05				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						1.000.000.000,00				1.320.000.000,00
2	10	05	2.01			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00				1.100.000.000,00
2	10	05	2.01	0005		Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										1.100.000.000,00
						Jumlah laporan penyelesaian permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	1.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah laporan penyelesaian permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	2 Laporan	1.100.000.000,00
2	10	10				PROGRAM PENATAGUNAN TANAH										
2	10	10	2.01			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00				220.000.000,00
2	10	10	2.01	0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota						200.000.000,00				220.000.000,00
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kot ^a	-	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	220.000.000,00
TOTAL												63.133.264.620,00				68.456.800.000,00